

LAMPIRAN
KEPUTUSANKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN
NOMOR : 000.8.3.4/ /DTKT/SK-PPID/II/2024 TANGGAL : 2 Februari 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVAN/ ALASAN	RETENSI WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Data SP2D ke Pihak ke 3	1.UU No .14 Tahun 2008 Pasal 17 No.2 2.PP No. 61 Tahun 2020 Pasal 3 3.UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 31 4.Permendagri No. 13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	Perlindungan usaha	Permanen
2	Laporan Keuangan yang belum di audit BPK	1.UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2.PP No.61 Tahun 2020 Pasal 3 3.UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4.Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Kelancaran proses Pemeriksaan	Sampai hail laporan pemeriksaan BPK diterbitkan
3	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa	1.UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2.PP No.61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	Permanen
4	Dokumen penawaran barang dan jasa	1.UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2.PP No 61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi pihak yang terlibat kontrak	Perlindungan usaha	Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan

			2. Melindungi hak atas kekayaan intelektual		kontrak
5	Data Pribadi penerimaan bantuan	1.UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 g dan h 2.PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
6	Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	1.UU No. 14 Tahun 2003 Pasal 17 2.PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3.UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4.PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5.Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan Data	Permanen
7	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat	1.UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j: informasi yang tdiak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2.UU No. 14 Tahun tentang KIP pasal 6 3.UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban	1. Menyangkut Privasi 2. Mengganggu Proses Penyidikan Pengawasan	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan
8	Data Pribadi Pegawai ASN	1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf g dan h 2.UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 127	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan	Efektifitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku

		3.UU 25 Tahun 2014 Pasal 128	keputusan dalam manajemen ASN		
--	--	------------------------------	----------------------------------	--	--

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 2 Februari 2024

KEPALA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI BANTEN.



SEPTO KALMADI
Pembina Utama Madya
NIP. 19680916-198903 1 010